

Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi: Melihat Kembali Kebijakan Progresif Menteri Keuangan Baru

Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada beberapa bank milik pemerintah guna mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Langkah ini menjadi kebijakan perdana sejak beliau dilantik pada 8 September 2025 dan menandai arah baru manajemen kas negara yang lebih proaktif dan produktif. Kebijakan ini menyalurkan kas negara yang sebelumnya “parkir” di Bank Indonesia dalam bentuk *Giro Pemerintah Pusat*, untuk kemudian dioptimalkan melalui sistem perbankan nasional yang dikelola Kementerian Keuangan via Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dana tersebut disalurkan kepada empat bank anggota Himbara (*Himpunan Bank Milik Negara*) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan pembagian: Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima sekitar Rp 55 triliun, Bank BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Pendanaan dilakukan melalui skema *deposito on-call*, yang memungkinkan pemerintah menarik kembali dana sewaktu-waktu jika diperlukan untuk pembiayaan APBN. Skema ini memberi fleksibilitas tinggi bagi pemerintah sekaligus memastikan dana kas negara tetap produktif. Bank penerima diwajibkan membayar bunga sekitar 4%, menjadikan kebijakan ini efisien secara fiskal sekaligus memberikan *liquidity injection* ke sistem keuangan nasional. Selain itu dana ini tidak boleh disalurkan kembali ke instrumen investasi seperti SBI maupun instrumen investasi lain. Kebijakan ini juga diberlakukan untuk memastikan proses penyaluran dana benar-benar dapat diserap oleh sektor riil.

Bagaimana Kebijakan ini Bekerja

Dari perspektif makroekonomi, langkah ini dapat dibaca sebagai kebijakan inovatif dalam memperkuat koordinasi fiskal-moneter dan mengurangi *idle fund* di kas negara. Penempatan dana pemerintah dalam skala besar memperkuat posisi likuiditas bank-bank Himbara, sehingga memperluas kemampuan mereka menyalurkan kredit produktif, termasuk kepada UMKM, industri pengolahan, dan sektor padat karya. Dalam konteks pemulihan ekonomi, kebijakan ini mempercepat transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil tanpa menambah beban utang negara. Dengan meningkatnya kemampuan intermediasi bank, dana ini diharapkan menggerakkan investasi baru dan ekspansi usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Efek pengganda (*multiplier effect*) dapat muncul melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, penyerapan tenaga kerja informal, serta peningkatan pendapatan sektor pertanian dan usaha kecil di daerah.

Kebijakan ini bisa dikatakan memiliki konsep yang mirip dari kebijakan *Quantitative Easing* dan Defisit Anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Bank Indonesia melakukan proses *Quantitative Easing* guna membantu kementerian keuangan yang pada saat itu harus melakukan defisit anggaran. Defisit anggaran dilakukan guna menahan laju penurunan ekonomi Indonesia, melalui peningkatan anggaran kerja kementerian dan aparatur yang terkait langsung dengan Covid-19. Hal ini terkhusus untuk sektor kesehatan Indonesia, dimana anggaran untuk pengadaan fasilitas rawat inap dan tempat tidur tambahan, alat tes swab untuk proses tracking pengidap covid, dan pengadaan vaksin diperlukan. Selain itu pendanaan juga digunakan untuk Kementerian Sosial, guna ekspansi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang secara ekonomi terdampak oleh pandemi Covid-19. Alhasil, kebijakan ini mampu menjadi rem penurunan ekonomi Indonesia, yang tercatat hanya turun 2.07% pada 2020 dan tumbuh 3.69% pada tahun 2021, setahun setelah pandemi Covid-19.

Dengan meminjam konsep yang sama, Menteri Keuangan Purbaya melakukan penyesuaian terhadap program, dimana alih alih menggunakan instrumen utang dan defisit, cadangan kas negara dialihkan untuk disalurkan sebagai pendanaan produktif. Selama ini, sebagian besar dana pemerintah mengendap di Bank Indonesia dengan imbal hasil rendah. Melalui skema ini, Kementerian Keuangan dapat memperoleh tambahan bunga (sekitar 4%) tanpa mengurangi fleksibilitas fiskal. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mendorong ekonomi, tetapi juga memperkuat disiplin dan efisiensi pengelolaan kas negara. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan baru yang lebih koordinatif antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Likuiditas yang disalurkan ke bank BUMN dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan domestik di tengah ketidakpastian global.

Catatan Implementasi dan Penguatan Efektivitas

Meskipun kebijakan ini membawa banyak manfaat, efektivitasnya tetap memerlukan tata kelola yang kuat agar dampaknya optimal dan berkelanjutan. Agar penyaluran dana benar-benar produktif, perlu panduan prioritas sektor yang memiliki *multiplier effect* tinggi—seperti pertanian, industri pengolahan, energi terbarukan, dan ekonomi digital. Pendekatan *targeted stimulus* semacam ini akan memastikan dana terserap di sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

Untuk mendorong perbankan lebih berani menyalurkan kredit ke sektor produktif berisiko menengah, pemerintah dapat memperkuat peran lembaga penjamin seperti Jamkrindo, Askrindo, dan LPEI. Skema *credit guarantee* akan menurunkan risiko kredit dan meningkatkan kepercayaan bank dalam menyalurkan dana. Pelaporan berkala mengenai penyerapan dana, distribusi sektoral, dan dampak ekonomi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan. Pendekatan *performance-based allocation* juga dapat diterapkan agar insentif bank sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Selain itu guna memastikan *creditworthiness* dari pihak-pihak penerima saluran dana, Bank dan Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan melibatkan lembaga pemeringkatan. Selain untuk melihat *creditworthiness* penerima kredit, lembaga pemeringkatan juga mampu melakukan penilaian terhadap sektor-sektor yang pertumbuhannya baik, guna memastikan dana yang disalurkan dapat benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya mencerminkan pendekatan fiskal yang progresif dan berlandaskan pada analisis data. Kebijakan ini sempat memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama mengenai sudut pandang praktis dan pragmatis dari kebijakan ini. Langkah yang diambil guna mengubah peran kas pemerintah dari sekadar simpanan pasif menjadi instrumen aktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan sebuah gebrakan yang bisa dikatakan “*Out of the Box*,” mengingat kebijakan yang serupa biasanya diambil dalam kondisi penurunan dan stagnasi ekonomi. Dengan tata kelola yang kuat, fokus penyaluran yang terarah, serta pemantauan hasil yang transparan, kebijakan ini berpotensi menjadi contoh baru pengelolaan fiskal yang efisien, stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keberhasilan kebijakan ini sendiri dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama untuk menilai keberhasilan penyaluran dana oleh Bank, indikator seperti *Loan to Deposit Ratio* dan *Net Interest Margin* secara keseluruhan dari industri perbankan, terkhusus untuk Bank yang menerima suntikan pendanaan dari pemerintah. Selain itu, indikator pertumbuhan perekonomian, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Perkapita, juga bisa menjadi indikator yang menggambarkan keberhasilan program ini secara holistik, karena kedua indikator ini mencerminkan pertumbuhan yang terjadi baik di sektor formal maupun informal. Dampak dari kebijakan ini baru bisa terasa di akhir kuartal terakhir 2025, atau mungkin di akhir kuartal pertama tahun 2026, mengingat akan adanya gap dari pemberlakuan efektif kebijakan ini, serta proses mekanisme dan pengukuran dampak dari kebijakan ini.